

LAPORAN KEGIATAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BIMA
TAHUN 2027



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BIMA
TAHUN 2026

1.1. LATAR BELAKANG

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui Musrenbang, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kemampuan keuangan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk menghimpun usulan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai tingkatan, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, hingga forum lintas pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antar sektor guna memastikan sinkronisasi program prioritas daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Dalam prosesnya, Musrenbang RKPD Tahun 2027 menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan, sekaligus sebagai dokumentasi proses perencanaan yang telah dilaksanakan. Laporan ini memuat tahapan kegiatan, hasil pembahasan, kesepakatan prioritas pembangunan, serta rekomendasi sebagai bahan

penyempurnaan penyusunan RKPD Tahun 2027. Dengan adanya laporan ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

1.2. TUJUAN

Tujuan Musrenbang RKPD (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah untuk menyusun dan menyepakati rencana pembangunan daerah tahunan secara partisipatif, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Secara lebih rinci, tujuannya meliputi:

- a. Mengharmoniskan usulan dari masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, hingga pemerintah daerah agar sejalan dengan visi misi kepala daerah dan dokumen perencanaan daerah;
- b. Menentukan program, kegiatan, lokasi, target, dan indikasi pendanaan yang akan dimasukkan dalam RKPD tahun berjalan;
- c. Memberikan ruang partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan;
- d. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- e. Mewujudkan perencanaan yang transparan dan akuntabel;
- f. Mendorong efektivitas penggunaan anggaran agar anggaran daerah difokuskan pada kebutuhan prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 258)
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 261).

1.4. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN :

Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 dilaksanakan pada hari Rabu, 08 April 2026 bertempat di Gedung Seni Budaya Kota Bima. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 08.30 wita – selesai.

Undangan/Peserta kegiatan :

Undangan/peserta kegiatan ini lebih kurang 150 orang yang terdiri dari Wali Kota Bima, Unsur DPRD Kota Bima, Unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Pimpinan BUMN/BUMD, Unsur Organisasi Kemasyarakatan, Unsur Akademisi, Perwakilan Tokoh Agama, Sekretaris Daerah Kota Bima, Segenap Assisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Bima.

Narasumber

1. Walikota Kota Bima memaparkan tentang capaian indikator pembangunan Kota Bima sampai pada tahun 2025, tantangan dan isu global serta tujuh program prioritas Pembangunan Kota Bima di Tahun 2027.
2. Kepala Bappeda Provinsi NTB dalam hal ini di sampaikan oleh Kepala Bidang P2EPD memaparkan tentang isu strategis, tema dan strategi pembangunan NTB tahun 2027 serta tujuan dan sasaran pembangunan NTB tahun 2027.
3. Kepala Bappeda Kota Bima memaparkan tentang Gambaran umum capaian Kota Bima sampai dengan tahun 2025, isu strategis, tema dan prioritas daerah, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 dan kebijakan keuangan tahun 2027.

Susunan Acara

Susunan acara Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Doa
4. Laporan Panitia
5. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bima tentang Rencana Pembangunan dan usulan Kegiatan Tahun 2027
6. Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Sambutan Walikota Bima sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2027
8. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2027
9. Penutup.

1.5. PELAKSANAAN KEGIATAN

Paparan beberapa narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD 2027 :

1. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Bapak Alfian Indrawan, S.Adm diawali dengan memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Pemerintah Kota Bima, terkhususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2027. Pemerintah Kota Bima diharapkan dapat mengintegrasikan prioritas pembangunan dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan program prioritas pembangunan Provinsi NTB dan program nasional sehingga dapat tercapai target pembangunannya. Pemerintah Kota Bima diharapkan dapat mencari dan menggali potensi-potensi pendapatan daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima sebagai mitra Pemerintah Kota Bima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemendagri Nomor 26

Tahun 2017 telah merampungkan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bima terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2027. Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan risalah rapat, dengar pendapat dan atau hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD memiliki peran strategis dalam penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2027 karena dokumen ini bersumber langsung dari harapan masyarakat atas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai upaya melaksanakan system pembangunan dengan cara *button-up* planning. Secara global pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bima Tahun 2026 masih berkisar pada permasalahan dan saran-saran yang dihadapi masyarakat agar Kota Bima kedepan semakin lebih baik dan musrenbang RKPD merupakan wadah dalam menghasilkan program-program pembangunan setahun kedepan yang jauh lebih baik.

DPRD Kota Bima mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima dalam penyusunan dan merealisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2027 sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai.

2. Dalam sambutannya Wali Kota Bima Bpk. H. A. Rahman, H. Abidin. S.E., menyampaikan Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2027 memiliki makna yang strategis karena menjadi forum penting dalam menjelaskan aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran dari DPRD, kebijakan pemerintah daerah serta arah pembangunan nasional dan provinsi.

Walikota Bima memberikan apresiasi terhadap Bappeda Provinsi NTB atas pendampingan dan dukungan yang terus di berikan kepada Pemerintah Kota Bima dalam menjaga sinkronisasi pembangunan antara pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Juga apresiasi terhadap ketua DPRD Kota Bima atas penyampaian pokok-

pokok pikiran DPRD yang merupakan representasi langsung aspirasi masyarakat.

Tema RKPD Kota Bima Tahun 2027 yaitu Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan merupakan refleksi atas tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini. Secara nasional isu strategis yang dihadapi antara lain penguatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Transformasi ekonomi dan peningkatan produktifitas daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan dan energi serta percepatan transformasi digital pelayanan public. Isu nasional sangat relevan dengan kondisi Kota Bima saat ini, tantangan utama daerah yaitu pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, penguatan layanan kesehatan masyarakat, penanganan persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah, pengendalian banjir serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim serta peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan responsive oleh karena itu pembangunan Kota Bima kedepan harus berorientasi pada pembangunan manusia sebagai pusat kebijakan, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik tapi oleh kualitas SDM yang sehat, terdidik, adaptif dan produktif. Walikota Kota Bima memastikan bahwa semua warga Kota Bima memperoleh akses yang adil terhadap kebutuhan sosial dasar mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, layanan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup yang layak berkelanjutan.

Walikota mengingatkan bahwa musrenbang bukan merupakan agenda tahunan belaka tapi merupakan ruang dialog pembangunan yang menghasilkan program prioritas yang focus dan berdampak langsung terhadap masyarakat dimana perencanaan program harus realistis sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, terintegrasi lintas sektor dan lintas pemerintahan serta mampu menjawab persoalan strategis Kota Bima secara berkelanjutan. Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan visi, menyelaraskan aspirasi

masyarakat dan memastikan bahwa arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta melalui musrenbang diharapkan lahir kesepakatan pembangunan yang kuat, bersinergis dan membawa Kota Bima yang maju, bermartabat dan berkelanjutan.

3. Kepala Bappeda Provinsi NTB dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang P2EPD Bappeda Kota Bima Bapak Firmansyah, S.Hut, M.Si menyampaikan bahwa pelaksanaan musrenbang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara partisipatif.

Tema dan arah Kebijakan RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 adalah “Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Ekosistem Industri Agromaritim dan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan” dengan Sembilan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2027 yang terdiri : Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), Diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas daerah, Kerjasama pengembangan ekonomi regional Bali-Nusa Tenggara, Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, reformasi birokrasi meningkatkan pelayanan public dan kemandirian fiskal, Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis, pengembangan kualitas SDM untuk menghadapi situasi VUCA, Pemerataan antar wilayah, inklusi sosial dan kesetaraan gender serta kemitraan dan kolaborasi multipihak serta lintas sektor.

4. Kepala Bappeda Kota Bima dalam pemaparannya menyampaikan tahapan penyusunan dokumen RKPD Kota Bima Tahun 2027 patuh waktu dan patuh mutu karena sudah sesuai timeline dan sesuai standar dokumen yang mengacu pada MCP KPK, Evaluasi Perencanaan dan ProSN. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima Tahun 2025 sebesar 3,95% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi NTB. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima mencapai 79,41 di atas IPM

NTB, Indeks Gini sebesar 0,85 lebih tinggi dari Indeks Gini NTB, Tingkat Kemiskinan Kota Bima lebih rendah yaitu sebesar 7,33 dibandingkan Tingkat kemiskinan NTB yaitu sebesar 11,38 tetapi tingkat pengangguran terbuka Kota Bima lebih tinggi sebesar 4,28 dibandingkan tingkat pengangguran terbuka NTB sebesar 3,05.

Tema Pembangunan Kota Bima Tahun 2027 yaitu Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan dengan tujuh prioritas pembangunan, tujuh tujuan dan tujuh belas sasaran pembangunan.

Kebijakan keuangan tahun 2027 sebesar Rp. 816.450.156.741,00 dimana arah kebijakan belanja dialokasi untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, belanja yang bersifat mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur pelayanan public, kelurahan, pengawasan), belanja untuk standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, program prioritas walikota, penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah serta dukungan terhadap prioritas nasional,

Pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD 2027 terdapat sesi diskusi atau masukan dari peserta rapat, beberapa masukan dan pertanyaan dari peserta rapat :

1. STIE Bima (Nurul)

- Perlu inovasi dalam pengembangan ekonomi kedepan khususnya pengembangan green ekonomi
- Peningkatan keterampilan tenaga kerja khususnya dalam pengolahan sampah yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD daerah

2. PKK Kota Bima (Intan)

Dalam menselaraskan program TP PKK Kota Bima dengan program pemerintah Kota Bima, TP PKK Kota Bima melalui pokja III ikut mendukung program pemerintah dengan focus kegiatan memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam lumbung hidup untuk

mendukung ketersediaan pangan keluarga tetapi kendalanya ada ternak liar yang mengganggu.

3. Universitas Mbojo (Hendra)

- Perbaiki sistem pendidikan khususnya data dapodik untuk siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
- Upaya meningkatkan daya saing generasi muda khususnya pencari kerja dengan mengadakan pelatihan sebagai upaya untuk mengendalikan tingkat pengangguran di Kota Bima
- Upaya mengendalikan stunting
- Perlu penanganan atau inovasi daur ulang sampah
- Perlu kolaborasi antara pemerintah, kampus dan swasta dalam menyukseskan target/sasaran pembangunan

4. Wakil Komisi II DPRD Kota Bima

- Kebijakan anggaran untuk tahun 2027 dipergunakan sesuai dengan kebijakan pusat 70 % untuk belanja wajib dan kebutuhan dasar, 30% untuk belanja pegawai.

5. Gapensi

- Untuk Anggaran Tahun 2027 sebaiknya menggunakan satuan standar harga tahun 2026
- Proses pengadaan barang dan jasa
- Membentuk PDAM Kota Bima

6. Lurah Penatoi

- Perlu penganggaran khusus untuk kelurahan dalam mendukung program pemerintah daerah

Adapun tanggapan dari narasumber berkaitan dengan masukan dari peserta kegiatan :

1. Untuk penganan sampah sudah tertuang pada prioritas daerah ke enam RKPD 2027 yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologis melalui pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau

2. Pada tahun 2026 untuk mendukung fondasi/ekonomi sirkular pemerintah kota sudah mengalokasikan hibah sebanyak 20 juta per bank sampah, bank sampah induk dan TP3R.
3. Untuk penanganan dan pengolahan sampah di pasar ama hami pada tahun 2026 sudah berkolaborasi dengan dinas PUPR dan DLH akan dibangun TPS3R
4. Pendampingan dan dukungan dari perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan sangat dibutuhkan khususnya pendampingan bagi kelompok-kelompok bank sampah yang sudah terbentuk di masing-masing kelurahan.
5. Penegakan Peraturan Daerah tentang penertiban ternak liar perlu peran bersama untuk mensosialisaikan perda di lingkungan masing-masing
- 6.** Untuk peningkatan kualitas tenaga kerja pada RKPD Tahun 2027 prioritas daerah ke tiga menyebutkan pengembangan kualitas tenaga kerja dengan focus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan focus pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) dan peningkatan kualitas UMKM
7. Berkaitan dengan 6 siswa yang tidak masuk dalam data dapodik telah di koordinasikan dan di komununikasikan ke kementrian Pendidikan sehingga ke enam tersebut sudah bisa mengikuti ujian TKA begitupun dengan DPR sebagai fungsi pengawasan dan control telah mengunjungi sekolah SDN 19 dan rapat koordinasi dengan orang tua siswa.
8. SSH dirapikan lagi krn inputan SSH sangat penting untuk penyusunan anggran yang sesuai dengan harga pasar
9. Masing-masing kelurahan sudah dialokasikan anggaran melalui kertas kerja yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan pada musrenbang

1.6. PENUTUP

Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan (Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anggota Komisi II DPRD Kota Bima, Anggota Komisi III DPRD Kota Bima, Asisten, Kepala Bappeda, Kepala PUPR, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BPS, perwakilan STIE, perwakilan dari Pertamina).

Kota Bima, April 2026

Kepala Bappeda Kota Bima,

Syarif Rustaman, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730409 199211 1 001

Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2027







